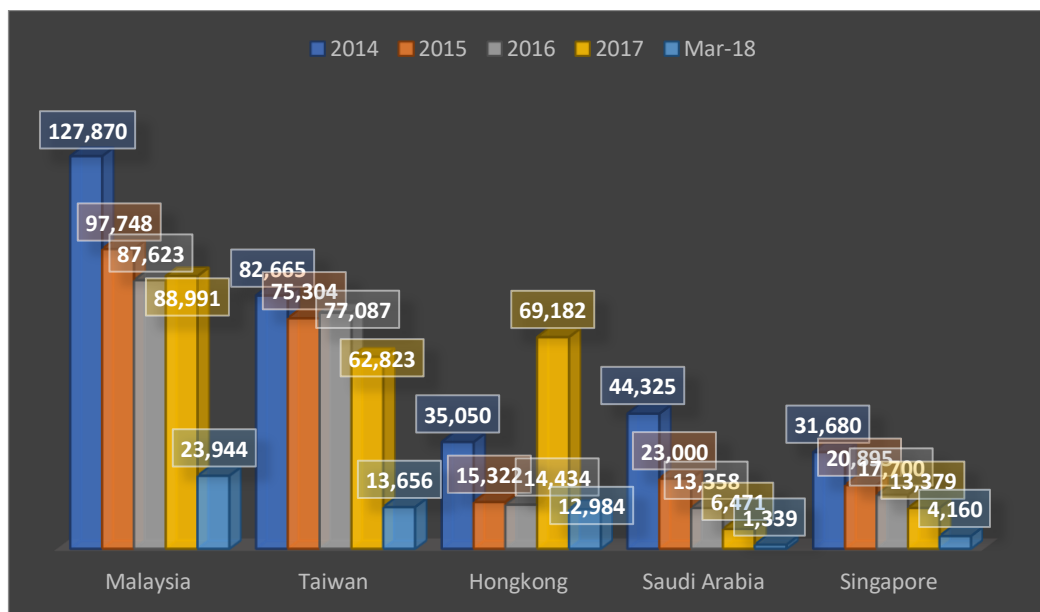


BAB II

Permasalahan Keamanan Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal di Malaysia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau biasa disebut TKI dianggap sebagai sumber devisa terbesar Indonesia. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir Malaysia merupakan negara tujuan utama terbesar bagi PMI. PMI yang bekerja di Malaysia mayoritas bekerja sebagai *domestic worker* yang bekerja di sektor informal.

Grafik 2.1
Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Lima Negara Penempatan Tertinggi Tahun 2014-2018



(Sumber : Kemenaker, 2018)

Berdasarkan pada grafik 2.1 menjelaskan tentang jumlah penempatan pekerja migran Indonesia yang terdapat di 5 negara tersebut bahwa jumlah tertinggi penempatan pekerja migran Indonesia yaitu di negara Malaysia dari tahun 2014-2018. Posisi terendah pada tahun 2014-2018 penempatan pekerja migran Indonesia adalah Negara Singapore.

Tabel 2.1
Penempatan Jabatan Pekerja Migran Indonesia

NO	JABATAN	2016	2017													Selisih 2016 & 2017	
		Jan-Des	Janu	Febru	Mar	April	Mei	Junj	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des	Total	Jumlah	T/N
1	Domestic Worker	45.309	5.504	7.202	6.600	6.026	8.484	7.758	9.197	6.867	8.549	9.570	9.786	6.615	92.158	46.849	N
2	Caregiver	54.160	3.270	3.242	3.852	3.133	3.388	4.100	4.725	3.912	3.243	3.658	4.081	3.429	44.033	-10.127	T
3	Operator	32.411	1.813	1.990	2.662	1.919	2.713	2.717	4.149	3.371	2.447	2.830	2.596	2.160	31.367	-1.044	T
4	Plantation Worker	30.834	1.671	2.179	2.617	2.044	1.726	2.028	3.602	2.283	1.941	1.855	2.116	2.408	26.470	-4.364	T
5	Worker	29.010	2.122	2.334	3.044	2.389	2.966	2.425	2.698	2.872	1.787	1.757	1.420	890	26.704	-2.306	T
6	Technician Hydraulic	5.519	424	323	438	343	460	441	473	603	693	813	922	809	6.742	1.223	N
7	Crane Operator	3.430	217	132	259	190	312	233	451	333	277	410	420	360	3.594	164	N
8	Housekeepers	3.757	152	132	156	168	135	128	190	122	103	96	123	111	1.616	-2.141	T
9	Construction Worker	2.853	175	219	251	137	105	151	151	182	78	133	146	103	1.831	-1.022	T
10	Cleaning Service	2.416	226	224	197	85	97	122	136	128	157	141	182	122	1.817	-599	T
11	Fisherman	692	210	269	301	231	231	133	211	239	272	313	242	167	2.819	2.127	N
12	Waiter	1.426	83	103	115	307	172	126	187	95	104	96	197	85	1.670	244	N
13	Operator EPC 1	643	142	314	234	147	138	196	127	316	143	186	45	32	2.020	1.377	N
14	Spa Therapist	1.058	43	58	135	330	264	195	109	94	106	92	64	69	1.559	501	N
15	Gardener	1.211	85	65	98	118	133	67	160	159	153	109	159	80	1.386	175	N
16	Manufacturing Worker	603	42	107	263	238	79	164	283	240	172	127	122	71	1.908	1.305	N
17	Cleaners	1.803	15	20	26	53	37	52	18	33	35	30	41	21	381	-1.422	T
18	Farmer	977	68	42	99	71	92	83	100	116	118	126	145	87	1.147	170	N
19	Nursing Home	746	54	84	71	55	57	73	81	78	77	42	52	44	768	22	N
20	Sanitation Officer	1.090	37	33	7	33	43	10	52	67	55	15	12	12	376	-714	T
21	Servant	1.093	8	14	10	1	0	0	2	3	3	4	4	1	50	-1.043	T
22	Restaurant Worker	597	23	16	17	23	19	22	22	28	17	71	39	24	321	-276	T
23	Agricultural Labour	301	27	46	33	30	59	30	62	45	37	27	36	43	475	174	N
24	Cooks	323	35	34	42	51	38	21	30	18	28	35	32	23	387	64	N
25	Poultry Man	240	30	9	10	9	25	8	5	32	39	85	112	63	427	187	N
26	Lainnya	11.949	525	551	696	1.136	933	506	872	949	817	804	1.035	970	9.794	-2.155	T
TOTAL		234.451	17.001	19.742	22.233	19.267	22.706	21.789	28.093	23.185	21.451	23.425	24.129	18.799	261.820	27.369	N

(Sumber: Website Resmi, Crisis Center BNP2TKI, 2018)

Selanjutnya, pada tabel 2.1 berdasarkan data pengelompokan pekerjaan , dijelaskan bahwa posisi pertama penempatan PMI di luar negeri adalah *domestic worker*. Jumlah PMI 45.306 orang pada 2016 dan mengalami kenaikan pada 2017 dengan selisih jumlah PMI sekitar 46.849 orang dari tahun 2016-2017. Berdasarkan tabel 2.1, menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling diminati oleh PMI adalah *domestic worker* atau yang lebih dikenal sebagai pekerja rumah tangga.

Tabel 2.2
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pekerja Informal
Di Malaysia

Negara	2015		2016		2017		2018	
Malaysia	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	102	11.237	58	11.243	43	10.907	43	10480
Total	11.339		11.301		10.950		10.523	

(Sumber : Data dari Crisis Center BNP2TKI, 2018)

Tabel 2.2 menjelaskan tentang jumlah PMI informal di Malaysia dari tahun 2015-2018. Untuk jumlah tertinggi yang bekerja informal pada tahun 2015 dengan total 11.339 orang yang didominasi oleh tenaga kerja wanita. Terjadi penurunan jumlah PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia pada tahun 2016-2018. Bab II, penulis akan menjelaskan kasus mengenai permasalahan yang dialami pekerja rumah tangga (PRT) di Malaysia. Sehingga penulis akan membahas dengan beberapa bagian terkait dalam konsep *Human Security* seperti keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan politik dan keamanan individu.

2.1 Keamanan Ekonomi (*Economic Security*)

Pada konsep keamanan manusia, terdapat beberapa lingkup seperti keamanan ekonomi berfokus pada pekerjaan yang memberi upah untuk berkontribusi dalam kebutuhan dasar manusia (UNDP,2010). PMI menginginkan pekerjaan dengan upah yang tinggi ketika bekerja diluar negeri. Salah satu negara yang paling diminati adalah negara Malaysia. Upah yang tinggi diterima oleh PMI mendorong mencari kerja di luar negeri tujuan untuk meningkatkan kebutuhannya. PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia masih sering mengalami permasalahan ancaman ekonomi. Ancaman utama keamanan ekonomi adalah kemiskinan terus menerus menerus dan pengangguran (UNDP,2009).

Permasalahan ancaman ekonomi yang dialami oleh PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia contoh kasus terkait, dikutip dari media surat kabar online (Merdeka, 2015) Ance Novita Mowilos (26 tahun) warga BTN Minasa Upa, Kelurahan Rappocini, Makasar, Ance adalah seorang PMI perempuan yang bekerja sebagai PRT di Malaysia seharusnya mendapatkan upah 2.400 ringgit dari majikan sesuai perjanjian dengan penyalur tenaga kerjanya. Hal tersebut sudah termasuk dalam kegiatan eksploitasi kerja terkait kasus yang dialami Ance. Awalnya, Ance bekerja di Malaysia karena ajakan dari temannya yang bernama Rosmini (40 tahun), yang menjanjikan bekerja sebagai karyawan restoran. Akan tetapi, Ance nasibnya bekerja sebagai PRT saat di Malaysia dan diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan (Merdeka, 2015).

Kasus lain yang terkait ancaman ekonomi seperti yang diberitakan dari surat kabar online (Detik News, 2015) terdapat 3 PMI perempuan yang bernama Suriati, Mariani dan Wahyuni yang berasal dari Aceh yang mendapatkan kekerasan dari majikan maupun gaji yang tidak dibayar saat bekerja di Malaysia menggunakan paspor pelancong dan kembali ke Aceh. Kasus pertama dalam berita online tersebut dari Suriati (40 tahun) berasal dari Gampong Aree, Kecamatan Dekima, Pidie yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di Selangor selama 4,5 bulan diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan.

Dijelaskan bahwa Suriati selama bekerja kerap kali bertengkar dengan majikan karena hak gaji belum diberikan yang dijanjikan hak gaji sebesar 600 ringgit Malaysia per bulan (Detik News, 2015). Tetapi, Suriati digaji hanya sekali selanjutnya tidak menerima gaji sama sekali oleh majikan, tepat bulan keempat ia hanya mendapatkan hak gaji sebesar 1000 ringgit Malaysia (Detik News, 2015). Ia menerima pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga karena tidak ada pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup sebenarnya meminta kepada agen penyalur tenaga kerja untuk bekerja di kilang (Detik News, 2015).

Kasus kedua, kasus dari seorang perempuan yang bernama Mariani (40 tahun) asal Bireuen, Aceh Utara yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di Malaysia selama dua bulan kerja , ia mendapatkan perlakuan kurang baik dari majikan dan tidak mendapatkan hak gaji. (Detik News, 2015).

Kemudian, kasus ketiga berbeda yang dialami oleh PMI perempuan yang bernama Wahyuni dengan kondisi mental yang dideritanya penuh rasa ketakutan saat diwawancarai oleh Gubernur Aceh (Detik News, 2015). Dalam kasus yang dijelaskan dari surat kabar online tersebut disimpulkan permasalahan yang dialami oleh ketiga PMI perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia tidak menerima gaji sesuai kesepakatan yang ada serta mengalami perlakuan yang kurang baik dari majikannya.

Permasalahan selanjutnya yang diberitakan dari media surat kabar online (Merdeka,2015) PMI perempuan yang bernama Sutiah (43 tahun) berasal dari Cirebon Jawa Barat yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di Tawau Negeri Sabah, Malaysia diberangkatkan dari Cirebon pada 20 oktober 2014. Alasan memilih menjadi PMI ke Negeri Sabah, Malaysia atas bujukan seseorang di kampung halaman dengan perjanjian bekerja sebagai pekerja rumah tangga (Merdeka,2015) .Diberitakan bahwa Sutiah selama bekerja disana mendapatkan perlakuan tidak manusiawi oleh majikan. Tidak hanya itu, Sutiah tidak dibayarkan dalam dua bulan lebih bekerja mengaku belum pernah menerima upah karena harus membayar agensi yang memberangkatkannya ke Negeri Sabah selama 4 bulan (Merdeka,2015).

Kasus serupa dialami oleh Siti Khasanah yang diberitakan dalam media surat kabar online (Detik News, 2014) , Siti merupakan tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di Malaysia sektor informal. Dalam artikel tersebut dijelaskan Siti sudah lama bekerja di Malaysia, majikannya tersebut tidak membayarkan hak gaji sejak 2007. Dimana pada akhirnya di bantu oleh Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) Penang, dimana KJRI Penang berhasil mengurus penyelesaian pembayaran gaji Siti yang telah bekerja di Malaysia sejak 2007 serta tidak dibayar oleh majikan selama kurang lebih 11 tahun (Detik News, 2014).

Tabel 2.1.1
Permasalahan Gaji Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Dibayarkan di Malaysia

NO	Tahun	Jumlah (orang)
1	2015	134
2	2016	110
3	2017	105
4	2018	71

(Sumber : Data BNP2TKI dari Crisis Center, 2018)

Tabel 2.1.1 menjelaskan permasalahan gaji PMI yang tidak di bayarkan. Data tersebut diambil dari BNP2TKI, dimana pada tahun 2015 merupakan tahun dengan jumlah tertinggi PMI yang tidak digaji oleh majikan mencapai 134 orang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian jumlah terendah permasalahan gaji PMI yang tidak dibayar yaitu tahun 2018 mencapai 71 orang.

Gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan tersebut telah melanggar hak para pekerja migran, mereka sudah melaksanakan kewajiban apa yang dikerjakan oleh majikan tetapi tidak mendapat upah yang seharusnya dibayarkan.

Oleh karena itu, berdasarkan dari beberapa kasus yang dialami oleh PMI sektor informal sebagai pekerja rumah tangga (PRT) terkait gaji yang tidak dibayar ini dapat berpengaruh ancaman utama keamanan ekonomi.

2.2 Keamanan Kesehatan (*Health Security*)

Salah satu ruang lingkup dari keamanan manusia adalah keamanan kesehatan. Setiap PMI mengharapkan adanya jaminan kesehatan khususnya jaminan kesehatan yang bekerja ke luar negeri. PMI di Malaysia rentan mengalami ancaman kesehatan, terutama PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Ancaman utama keamanan kesehatan yang diartikan oleh (UNDP,2009) yaitu penyakit menular yang mematikan, makanan yang tidak aman, kekurangan gizi, dan kekurangan akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan dasar

Dikutip dari media surat kabar online (BBC, 2018) terkait ancaman kesehatan, Adelina Lisao (21 tahun) PMI perempuan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga meninggal dunia dengan kondisi luka-luka pada tanggal 11 februari 2018. Sebelum Adelina meninggal dunia, salah satu penyebabnya adalah malnutrisi serta terdapat bekas gigitan kemungkinan terkena gigitan binatang (BBC,2018). Dimana Adelina sebulan terakhir sebelum meninggal, dipaksa tidur di luar rumah bersama peliharaan majikan, tidak diberi makan, dan mengalami tindak kekerasan fisik (ibid). Permasalahan kasus Adelina ini mendorong Indonesia perlu ketegasan terkait perlindungan kesehatan bagi pekerja rumah tangga di Malaysia.

Kasus lain yang terkait ancaman kesehatan seperti diberitakan oleh media surat kabar online (Detik News, 2015) PMI perempuan yang bernama Wahyuni berasal dari Aceh yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga mengalami kondisi kesehatan yang buruk seperti gangguan mental. Dimana Ia saat diwawancari oleh Gubernur Aceh tidak dapat memberikan respon serta dengan raut muka yang penuh ketakutan (Detik News, 2015).

Kondisi tersebut yang dialami oleh Wahyuni disebabkan saat bekerja di Malaysia mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dilakukan oleh majikannya. Kondisi seseorang yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, orang tersebut saat bertemu orang baru pasti merasa ketakutan yang akan menjadi gangguan jiwa.

Tidak hanya itu, masih banyak permasalahan yang terkait ancaman kesehatan yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1
Permasalahan PMI Yang Mengalami Sakit jiwa / Depresi di Malaysia

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2015	16
2	2016	5
3	2017	12
4	2018	4

(Sumber : Data dari Crisis Center BNP2TKI,2018)

Jika dilihat dari tabel 2.2.1 menjelaskan PMI yang mengalami depresi/sakit jiwa, data ini didapatkan dari BNP2TKI yaitu tingkat jumlah tertinggi tahun 2015 mencapai 16 orang, sedangkan jumlah terendah tahun 2018 PMI yang mengalami sakit jiwa/depresi saat bekerja di Malaysia. Data tersebut yang mengalami peningkatan serta penurunan jumlah PMI yang sakit jiwa/depresi

Tabel 2.2.2
Permasalahan PMI Yang *Unfit* (pemalsuan sertifikat kesehatan atau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan) di Malaysia

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2015	27
2	2016	29
3	2017	6
4	2018	5

(Sumber : Data dari Crisis Center BNP2TKI,2018)

Selanjutnya pada tabel 2.2.2 menjelaskan jumlah PMI yang *unfit* di Malaysia pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 29 orang, sedangkan tahun 2018 PMI yang *unfit* mengalami penurunan sebanyak 5 orang.

Dari data kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia masih rentan terutama yang tidak sesuai prosedur mengalami permasalahan gangguan kesehatan baik mengalami sakit jiwa maupun kondisi *unfit* (pemalsuan sertifikat kesehatan atau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan kondisi kesehatan PMI informal di Malaysia.

2.3 Keamanan Politik (*Political Security*)

Keamanan politik merupakan salah satu lingkup dari konsep keamanan manusia. Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengharapkan jaminan perlindungan dan penempatan kerja di Malaysia. PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia masih rentan adanya ancaman keamanan politik. Ancaman utama keamanan politik adalah adanya tindakan represif politik dan pelanggaran HAM (UNDP,2009)

Permasalahan PMI di Malaysia terkait ancaman keamanan politik, pemerintah Indonesia memperkirakan lebih satu juta dari 1,9 juta PMI bekerja dengan status tidak resmi di Malaysia (usembassy.gov). Contoh kasus lain, dikutip dari media surat kabar online Merdeka terdapat tiga orang PMI perempuan yang berasal dari Jawa Tengah dibawah umur menjadi korban human trafficking dipekerjakan di tempat prostitusi di Malaysia (Parwito, 2014). Dijelaskan bahwa tiga orang PMI perempuan tersebut dijanjikan awalnya akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga tetapi mereka dipindahkan pada bidang pekerjaan lainnya, salah satunya bekerja di tempat prostitusi (Ibid).

Kasus selanjutnya diberitakan dalam surat kabar online Tribun News, PMI perempuan bernama Dahliana (19 tahun) asal dari Langsa, Aceh, Ia diberangkatkan melalui bandara Kualanamu pada tanggal 4 Februari 2018 secara nonprosedural dengan gaji yang memadai sesuai keterangan orang tua korban (Bakri,2018). Diberitakan bahwa Dahliana diperjualbelikan oleh agen PMI ilegal asal Sumatra Utara hingga ke majikannya di Malaysia, awalnya Dahlia dijanjikan bekerja sebagai *cleaner service* tetapi saat di tempat majikannya berada diwilayah Selangor, Ia bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) (ibid). Pekerja migran ilegal tentu rawan terhadap sindikat perdagangan manusia seperti kasus yang dialami oleh Dahliana. Pada umumnya mereka yang menjadi pekerja migran ilegal di Malaysia yang dijanjikan dengan gaji besar, fasilitas mendukung, dan kerja sesuai dengan keinginannya. Tapi itu hanya sebagai jebakan bagi mereka yang kurang memahami aturan bekerja di luar negeri. Diberitakan oleh surat kabar online Republika, Menurut LSM Migran Care memperkirakan 120 warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia di Malaysia sejak tahun 2016, dimana sebanyak dua juta warga

negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia sebagai pekerja rumah tangga (Ani, 2018). Dalam artikel berita tersebut menjelaskan adanya kematian PMI perempuan muda terjadi karena maraknya sindikat perdagangan manusia disebabkan oleh mereka yang bekerja secara ilegal. Pada 2018, sebanyak 20 orang PMI perempuan menjadi korban meninggal di Malaysia seperti kasus meninggalnya Adelina maupun korban sindikat perdagangan manusia (Ani, 2018). Dijelaskan dalam berita tersebut data dari Migran Care terdapat 62 warga negara Indonesia (WNI) perempuan dari Nusa Tenggara meninggal dunia di Malaysia pada tahun 2017, diketahui sebagai korban perdagangan manusia (Ani, 2018). Namun kasus perdagangan manusia tampaknya meningkatkan angka kematian PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia. PMI ilegal di Malaysia disebabkan oleh mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak di Malaysia. Tetapi kenyataannya diantara mereka mendapatkan nasib buruk menjadi sindikat korban perdagangan manusia.

Dikutip dari surat kabar online Kompas, tahun 2017 PMI ilegal dideportasi dari Malaysia sebanyak 4.863 orang, sebelum PMI ilegal di deportasi, mereka ditahan dalam sejumlah penjara Pekan Nanas Johor, penjara Tanah Merah Kelantan, penjara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) Sepang dan penjara Ajil Terengganu (Movanita,2017). Artikel berita tersebut menjelaskan penyebab PMI ilegal di Malaysia menurut Kepala bagian Humas dan Umum Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, Agus Sampurno bahwa umumnya mereka melanggar aturan, pelanggaran yang dimaksud seperti menyalahgunakan izin tinggal dan tidak memiliki izin tinggal contoh tidak memiliki paspor maupun melalui jalur resmi dan sebagainya. Ditjen Imigrasi bekerjasama dengan instansi penegak hukum terkait adanya calon PMI nonprosedural seperti data PMI yang ilegal akan dimasukkan ke dalam database keimigrasian yang ditugaskan di perwakilan RI di luar negeri (Movanita,2017).

Tabel 2.3.1
Permasalahan PMI Yang Bekerja Tidak Berdokumen
Di Malaysia

No	Tahun	Jumlah (orang)
1	2015	60
2	2016	73
3	2017	353
4	2018	434

Sumber : Crisis Center BNP2TKI, 2018

Berdasarkan tabel 2.3.1 menjelaskan PMI yang tidak berdokumen bekerja di Malaysia, terdapat jumlah peningkatan yang drastis di tahun 2017 mencapai 349 orang serta tahun 2018 mencapai 492 orang. Jika diketahui peningkatan itu dratis akibat tahun 2016 MoU Indonesia dengan Malaysia masa berlakunya selesai. Tidak adanya MoU antara Indonesia dengan Malaysia rentan terhadap PMI yang tidak resmi.

Adanya pekerja migran yang tidak resmi dapat mengakibatkan asal mula perdagangan manusia di Malaysia. Sejarah pekerja migran menjadi korban perdagangan manusia didokumentasikan oleh Pemerintah Malaysia (www.idwfed.org). Tidak hanya menjadi korban sindikat perdagangan manusia, tetapi korban penipuan seperti agen tenaga kerja memiliki riwayat saran dan janji palsu tentang proses mendapatkan izin dan pekerjaan di Malaysia (www.idwfed.org). PMI informal yang bekerja di Malaysia menjadi korban perdagangan manusia sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.3.2
Permasalahan PMI Menjadi korban Perdagangan manusia
di Malaysia

No	Tahun	Jumlah (orang)
1	2015	17
2	2016	22
3	2017	12
4	2018	5

Sumber : Crisis Center BNP2TKI, 2018

Jika dilihat pada tabel 2.3.2 menjelaskan PMI yang bekerja di Malaysia menjadi korban perdagangan manusia tahun 2016 mengalami peningkatan dratis dengan jumlah sebanyak 22 orang sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan jumlah sebanyak 5 orang. Tahun 2016 dimana MOU Indonesia dengan Malaysia tentang domestic worker sudah masa berlakunya berdampaknya peluang PMI informal menjadi korban perdagangan manusia.

Terdapat kasus lain terkait ancaman politik, salah satunya PMI perempuan bernama Radiyah asal Majelengka yang dipulangkan karena tidak memiliki dokumen resmi kerja serta tidak lengkap di Malaysia (Ashab, 2018). Dalam artikel tersebut dijelaskan Radiyah selama tujuh bulan di Malaysia telah di penjara selama empat bulan atas pelanggaran dimana, Radiyah bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan dipulangkan karena tidak memiliki dokumen resmi kerja yang lengkap. Kemudian, terkait artikel tersebut menurut Koordinator pemulangan PMI korban perdagangan manusia dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia oleh Pitter M. Matakana menjelaskan mereka yang dideportasi dari Malaysia rata-rata karena menyalahgunakan paspor dan tidak memiliki dokumen resmi kerja di Malaysia. Mayoritas pekerja migran Indonesia yang tidak resmi menggunakan paspor pelancong tapi mereka malah bekerja di Malaysia.

PMI yang tidak memiliki dokumen resmi dan tidak lengkap bekerja di Malaysia bisa dipenjara dan setelah masa penahanannya akan dipulangkan ke negara asal seperti yang dialami oleh Rudyah yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Maka pihak pemerintah Malaysia akan melakukan tindakan bagi PMI ilegal yang melanggar peraturan di Malaysia harus menerima sanksi seperti dipaksa dideportasi ke Indonesia, dimana dari pihak pemerintah Indonesia akan kembali mereka ke daerah asal masing-masing.

Dengan demikian pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perlindungan PMI khusus yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia. PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia murni bukan dorongan dari pemerintah tetapi dari mereka yang menginginkan bekerja di Malaysia untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Diantara mereka juga terjebak praktik perdagangan manusia.

2.4 Keamanan Individu (*Personal Security*)

Keamanan Individu merupakan bagian dari lingkup konsep keamanan manusia. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia mengharapkan perlindungan keamanan individu agar terhindar dari ancaman kekerasan maupun diskriminasi yang berifat perorangan. Ancaman keamanan individu yaitu kekerasan fisik, kejahatan, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga dan pekerja anak (UNDP,2009). PMI masih sering mengalami permasalahan terkait keamanan individu seperti bentuk ancaman kekerasan dan diskriminasi yang dialami pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia

Permasalahan yang terkait ancaman dari keamanan individu , dikutip dari surat kabar online News Detik, menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia pada 2015 PMI perempuan bernama Norfia Linda (23 tahun) berasal dari Lombok Timur bekerja sebagai pekerja rumah tangga, menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia secara non prosedural diberangkatkan melalui Medan pada 3 Maret 2015 dengan menggunakan visa wisata (News Detik, 2015). Norfia mengalami penganiayaan berupa kekerasan fisik pada badan ,wajah lembam, benjolan di kepala dan jari sebelah kiri patah yang dilakukan oleh majikannya (ibid). Terkait yang diberitakan tersebut, semula Norfia berangkat ke Malaysia melalui agen perseorangan yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Diberitakan melalui surat kabar online Tempo, Norfia setelah mengalami tindakan kekerasan, ia dibuang oleh majikannya ke hutan Ulu Yam Selangor dan ditemukan warga untuk dibawa ke rumah sakit (Hidayat, 2015). Terdapat pengakuan dari Norfia yang diberitakan tersebut bahwa Ia mengaku masuk ke Malaysia melalui jalur laut Medan serta dia tidak diberikan gaji sepersen pun.

Kasus lain terkait ancaman individu ,dikutip dari (Buruh Migran, 2016) PMI perempuan bernama Suyanti Sutrisno (19 tahun) yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) mulai masuk ke Malaysia pada 7 Desember 2016 melalui Tanjung Balai-Port Klang, Malaysia yang dijemput seorang agen bernama Ruby dan diantarkan ke rumah majikan nya yang bernama Rozhita asal Malaysia. Diberitakan dari surat kabar online News Detik, Suyanti mengalami penganiayaan

yang diserang oleh majikan dengan menggunakan pisau dapur, tongkat logam bahkan sebuah payung (Christiastuti, 2016).

Suyanti mengalami luka-luka di bagian mata, kepala dan organ dalamnya tepat di paru, ada gumpalan darah dalam otak dan tulang pipinya hancur (ibid). Kasus yang penganiayaan dialami oleh Suyanti telah melanggar pasal 397 hukum pidana dimana Rozita (majikan) terancam hukuman seumur hidup atau hukum 20 tahun penjara (Christiastuti, 2016). KBRI Kuala Lumpur telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk menyampaikan kasus tersebut agar diproses hukum yang adil dan pelaku dihukum setimpal (Buruh Migran, 2016). Berdasarkan artikel berita tersebut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mendorong proses hukum secara tegas terhadap majikan yang menganiaya Suyanti, Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu meningkatkan kerjasama dan berkomitmen untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia sehingga pihak aparat kepolisian Malaysia juga bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut (ibid). Kasus yang dialami oleh Suyanti perlu ada komitmen bilateral dari Indonesia dan Malaysia untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak pekerja rumah tangga migran (The Jakarta Globe, 2016).

Tabel 2.4.1
PMI Mengalami Tindak Kekerasan dari Majikan di Malaysia

No.	Tahun	Jumlah (Orang)
1.	2015	19
2.	2016	26
3.	2017	21
4.	2018	8

(Sumber : Crisis Center BNP2TKI, 2018)

Pada tabel 2.4.1, menjelaskan bahwa permasalahan mengenai tindak kekerasan dari majikan yang dilakukan kepada PMI di Malaysia, jumlah tertinggi tahun 2016 mencapai 26 orang mengalami kekerasan dari majikan di Malaysia. sedangkan jumlah terendah tahun 2018 yang mencapai 8 orang.

Tabel 2.4.2
PMI Mengalami Beban Kerja Terlalu Berat di Malaysia

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2015	3
2	2016	3
3	2017	9
4	2018	7

(Sumber : Crisis Center BNP2TKI, 2018)

Jika dilihat pada tabel 2.4.2 menjelaskan PMI yang mengalami beban kerja terlalu berat di Malaysia yaitu tingkat jumlah tertinggi tahun 2017 mencapai 9 orang sedangkan jumlah terendah tahun 2015-2016 sebesar 3 orang.

Kemudian terdapat permasalahan yang berkaitan dalam ancaman individu seperti perlakuan kasar yang dialami oleh PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia tidak hanya dilakukan majikan nya tetapi dilakukan agen yang memberangkatkan mereka. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan di BP3TKI Semarang pada 22 November 2018 dengan salah satu seorang mantan pekerja rumah tangga di Malaysia sebagai berikut:

Salah satu seorang mantan PMI informal yang bernama Ibu Parsih (37 tahun) berasal dari Wonosobo Jawa Tengah yang menceritakan ” saya saat kembali ke Indonesia menjadi pekerja rumah tangga di Malaysia pada 2016. Mbak saya pernah mengalami perlakuan kasar yang dilakukan agen yang memberangkatkan, pihak agen memberikan makan kepada PMI perempuan dengan cara di lempar.”

Dari hasil wawancara diatas perlakuan kasar yang dialami oleh Ibu Parsih dilakukan oleh agen yang memberangkatkan para tenaga kerja Indonesia (TKI). Ancaman Individu yang dialami mereka bukan hanya dianiya oleh majikan tetapi juga bisa pihak agen yang memberangkatkan.

Jadi berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia dari tahun-ketahun masih mengalami permasalahan ancaman individu seperti perlakuan tidak manusiawi dilakukan oleh majikan, perlakuan kasar dari pihak agen maupun mengalami beban kerja yang

berat. Sehingga Pemerintah Indonesia perlu menekan Pemerintah Malaysia dalam memproses kasus secara cepat dan adil, baik melalui hubungan diplomatik kedua belah pihak maupun menggunakan Undang-Undang yang ada tentang Penempatan dan Perlindungan pekerja Indonesia sebagai bentuk panduan keadilan.